



**PROFIL PEMBANGUNAN
KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**

**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Profil Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan gambaran kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk data statistik baik statistik dasar maupun statistik sektoral. Selain sebagai sumber data dan informasi hasil-hasil pembangunan, Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah kedepannya.

Oleh karena itu, diharapkan data-data yang disajikan dalam Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memberikan gambaran riil hasil pelaksanaan pembangunan, sehingga selain untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa profil ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kedepannya diharapkan dapat terus ditingkatkan serta dilakukan upaya penyempurnaan.

Selayar, 1 September 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Drs. H. BASOK LEWA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4. Sistematika Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	6
2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	6
2.2. Pemerintahan.....	8
2.3. Penduduk.....	10
BAB III KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	14
3.1. Pembangunan Manusia	14
3.2. Kesejahteraan Masyarakat.....	16
BAB IV POTENSI DAERAH.....	26
4.1. Potensi Daerah	26
4.2. Sarana dan Prasarana	39
BAB V PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH	46
5.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	46
5.2. PDRB Perkapita.....	47
5.3. Gini ratio	48
5.4. Persentase Penduduk Miskin.....	49
5.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	51
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	53
6.1. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	53
6.2. Keuangan Daerah.....	59
BAB VII PENUTUP	65
7.1. Kesimpulan	65
7.2. Rekomendasi	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	7
Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021	8
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021.....	9
Tabel 2. 4 Jumlah PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan tahun 2019-2021.....	9
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019- 2021	11
Tabel 2. 6 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021.....	11
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.....	12
Tabel 3. 1 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021	15
Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	17
Tabel 3. 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	19
Tabel 3. 4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021.....	19
Tabel 3. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	20
Tabel 4. 1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	26
Tabel 4. 2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	27
Tabel 4. 3 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	28

Tabel 4. 4	Produksi Buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	29
Tabel 4. 5	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	30
Tabel 4. 6	Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021	31
Tabel 4. 7	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	32
Tabel 4. 8	Lokasi Ekowisata di Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021	36
Tabel 4. 9	Jumlah Pengunjung di Taman Nasinal Takabonerate tahun 2021	37
Tabel 4. 10	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	38
Tabel 4. 11	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	39
Tabel 4. 12	Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021	40
Tabel 4. 13	Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	41
Tabel 4. 14	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021	42
Tabel 4. 15	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021	43
Tabel 4. 16	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.....	44
Tabel 4. 17	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	44
Tabel 5. 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021.....	46

Tabel 5. 2	Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021.....	48
Tabel 5. 3	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021.....	49
Tabel 5. 4	Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021.....	50
Tabel 5. 5	Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021	51
Tabel 6. 1	Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.....	58
Tabel 6. 2	Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022	60
Tabel 6. 3	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022	62
Tabel 6. 4	Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022.....	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021	15
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021.....	21
Grafik 3. 3 Indikator Kemiskinan Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021	22
Grafik 3. 4 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	23
Grafik 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021.....	24
Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	25
Grafik 4. 1 Produksi Padi Sawah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021	27
Grafik 4. 2 Banyaknya Tamu Hotel/ Akomodasi/ Penginapan Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2021	34
Grafik 4. 3 Jumlah Penumpang Melalui Bandara Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2021	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam satu kesatuan dan keterkaitan antar wilayah, maka perlu dilakukan melalui pendekatan teknokratik, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Bab III pasal 7 (tujuh) menjelaskan bahwa Bappeda sebagai pengelola informasi pembangunan daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah yang memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hal inilah yang mendasari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Profil pembangunan daerah dapat memberikan gambaran mengenai hasil pelaksanaan program pembangunan daerah serta dapat digunakan untuk menilai potensi sumber daya alam, manusia dan hasil kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah untuk menyajikan data dan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya. Publikasi ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sumber informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan;
2. Tersedianya data yang valid dan dapat diakses oleh semua pihak;
3. Memberikan kemudahan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4. Sistematika Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan gambaran singkat tentang pentingnya profil pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Menjelaskan Tujuan dan Manfaat penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Memberikan gambaran struktur penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar serta garis besar isi setiap bab.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Menjelaskan dan menyajikan data tentang kondisi geografis daerah yang meliputi Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administratif, serta Keberadaan Pulau dan Sebarannya.

2.2. Pemerintahan

Menyajikan data dan penjelasan tentang wilayah administratif serta sistem pemerintahan.

2.3. Penduduk

Menyajikan data dan penjelasan tentang jumlah, sebaran dan kepadatan penduduk.

BAB III. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

3.1. Pembangunan Manusia

Memberikan data dan penjelasan tentang aspek pembangunan manusia yang meliputi Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita yang Disesuaikan.

3.2. Kesejahteraan Masyarakat

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita, kemiskinan dan gini rasio.

3.3. Ketenagakerjaan

Memuat penjelasan tentang kondisi ketenagakerjaan yang antara lain mencakup indikator angkatan kerja dan pengangguran terbuka.



BAB IV. POTENSI DAERAH

Memberikan penjelasan dan data terkait potensi daerah yang dapat dikembangkan, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri dan perdagangan.

BAB V. PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

Menyajikan data dan penjelasan terkait perbandingan indikator makro dengan kabupaten/kota lain dalam wilayah setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

BAB VI. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Memuat penjelasan tentang siklus perencanaan dan penganggaran, prioritas pembangunan dan capaian kinerja pembangunan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan semua wilayah daratannya terpisah dari pulau Sulawesi. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km², dan luas wilayah laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak diantara 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 34 buah, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam *website* sulselprov.go.id bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia. Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Takabonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pulau
1	Pasimarannu	195,33	15
2	Pasilambena	114,88	16
3	Pasimasunggu	131,8	21
4	Takabonerate	49,3	29
5	Pasimasunggu Timur	67,14	5
6	Bontosikuyu	248,22	29
7	Bontoharu	128,12	8

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pulau
8	Benteng	24,63	-
9	Bontomanai	136,42	-
10	Bontomatene	193,05	6
11	Buki	68,14	-
Kepulauan Selayar		1.357,03	130

Sumber: BPS Kepulauan Selayar, 2022

2.2. Pemerintahan

Dalam rangka percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui upaya pelayanan secara professional, efektif dan berkeadilan, diperlukan peningkatan kapasitas, penataan administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma pemerintahan yang baru. Dalam menjalankan pemerintahan, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi dalam 11 Kecamatan, 81 Desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomatene dengan jumlah desa sebanyak 12 Desa/Kelurahan.

Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Pasimarannu	± 140	8
2	Pasilambena	± 193	6
3	Pasimasunggu	± 85	7
4	Takabonerate	± 75	9
5	Pasimasunggu Timur	± 96	6
6	Bontosikuyu	± 18	12
7	Bontoharu	± 3	8
8	Benteng	± 0	3
9	Bontomanai	± 18	10
10	Bontomatene	± 27	12
11	Buki	± 19	7

Sumber: BPS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kep. Selayar, 2022

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara atau pelayan publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan

pembangunan. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, dibutuhkan SDM aparatur yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pada tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3.615 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.448 orang dan perempuan sebanyak 2.167 orang. Tabel berikut menunjukkan penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

No.	Jenis Kelamin	Pegawai Negeri Sipil (Orang)		
		2019	2020	2021
1	Laki-laki	1.565	1.533	1.448
2	Perempuan	2.219	2.233	2.167
	Jumlah	3.784	3.766	3.615

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Jika dilihat dari golongannya, PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, didominasi oleh Golongan III dengan jumlah sebesar 2.232 orang dan berturut-turut adalah Golongan IV 758 orang, Golongan II 605 orang dan Golongan I 20 orang. Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, yang terbesar adalah PNS berpendidikan Sarjana/ Doktor/ Ph.D dengan jumlah 2.422 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan tahun 2019-2021

Uraian	Pegawai Negeri Sipil (Orang)		
	2019	2020	2021
Jumlah PNS Menurut Golongan			
Golongan I	27	22	20
Golongan II	723	638	605
Golongan III	2.256	2.304	2.232
Golongan IV	778	802	758
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan			
Sampai dengan SD	13	9	9
SMP/ Sederajat	30	25	20
SMA/ Sederajat	743	651	593
Diploma I, II/ Akta I, II	295	228	184
Diploma III/ Akta III	415	408	387
Sarjana/ Doktor/ Ph.D	2.288	2.445	2422
Jumlah PNS	3.784	3.766	3.615

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

2.3. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor yang utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksanaan pembangunan. Atas dasar ini maka pembangunan nasional dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya cukup baik. Namun demikian jumlah penduduk yang besar juga merupakan beban pembangunan jika kualitasnya rendah apalagi jika distribusinya secara geografis tidak merata dan komposisi secara sosial dan budaya sangat beragam.

Berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat rekreasi dan lainnya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 berjumlah 137.974 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 25.096 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 adalah 135.624 jiwa, kemudian pada tahun 2020 tumbuh menjadi 137.071 jiwa dan data tahun 2021 menjadi 137.974 jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 0,93 persen pertahun. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019- 2021

KECAMATAN	2019	2020	2021
Pasimarannu	9.367	10.492	10.603
Pasilambena	7.795	8.005	8.096
Pasimasunggu	8.585	8.638	8.702
Takabonerate	13.960	13.484	13.541
Pasimasunggu Timur	7.577	7.866	7.885
Bontosikuyu	15.356	15.303	15.328
Bontoharu	13.683	14.608	14.762
Benteng	26.701	24.849	25.096
Bontomanai	12.889	13.703	13.790
Bontomatene	13.248	13.381	13.398
Buki	6.463	6.742	6.773
Kepulauan selayar	135.624	137.071	137.974

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 102 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 24,63 km² dihuni oleh 25.096 jiwa dan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 1.019 jiwa/km². Adapun daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimarannu yaitu 54 jiwa/km². Berikut disajikan data rata-rata penduduk per desa, kepadatan penduduk per km² tahun 2019-2021:

Tabel 2. 6 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	BANYAKNYA		RATA-RATA	
		Desa	Penduduk	Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk per km ²
Pasimarannu	195,33	8	10.603	1.325	54
Pasilambena	114,88	6	8.096	1.349	70
Pasimasunggu	131,8	7	8.702	1.243	66
Takabonerate	49,3	9	13.541	1.505	275
Pasimasunggu Timur	67,14	6	7.885	1.314	117
Bontosikuyu	248,22	12	15.328	1.277	62
Bontoharu	128,12	8	14.762	1.845	115
Benteng	24,63	3	25.096	8.365	1.019
Bontomanai	136,42	10	13.790	1.379	101

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	BANYAKNYA		RATA-RATA	
		Desa	Penduduk	Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk per km ²
Bontomatene	193,05	12	13.398	1.117	69
Buki	68,14	7	6.773	968	99
2021	1.357,03	88	137.974	1.972	102
2020	1.357,03	88	137.071	1.957	101
2019	1.357,03	88	135.624	1.526	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen atau pada tahun 2021 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun sebesar 23,45 persen (32.356 jiwa, terdiri dari 16.577 laki-laki dan 15.779 perempuan) dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 93.749 jiwa (67,95 persen) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas hanya sekitar 8,60 persen atau 11.869 jiwa (terdiri dari 5.147 laki-laki dan 6.722 perempuan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
1	0 - 4	4.976	4.688	9.664	106,14
2	5 - 9	5.178	4.876	10.054	106,19
3	10 - 14	6.423	6.215	12.638	103,35
4	15 - 19	6.961	6.580	13.541	105,79
5	20 - 24	5.780	5.548	11.328	104,18
6	25 - 29	5.208	5.111	10.319	101,90
7	30 - 34	5.214	5.489	10.703	94,99
8	35 - 39	5.049	5.390	10.439	93,67
9	40 - 44	4.537	4.765	9.302	95,22
10	45 - 49	4.181	4.337	8.518	96,40
11	50 - 54	3.424	3.975	7.399	86,14
12	55 - 59	3.137	3.471	6.608	90,38

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
13	60 - 64	2.498	3.094	5.592	80,74
14	65 - 69	1.944	2.280	4.224	85,26
15	70 - 74	1.328	1.783	3.111	74,48
16	75 +	1.875	2.659	4.534	70,52
JUMLAH (KAB/KOTA)		67.713	70.261	137.974	96,37

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sex rasio atau rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki dalam suatu wilayah. Sex rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022¹ adalah 96,37 persen, yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk perempuan masih lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki atau jika terdapat 100 orang perempuan dalam suatu wilayah maka terdapat 96 atau 97 orang laki-laki.



BAB III KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

3.1. Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberadaan manusia sebagai pelaku pembangunan tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

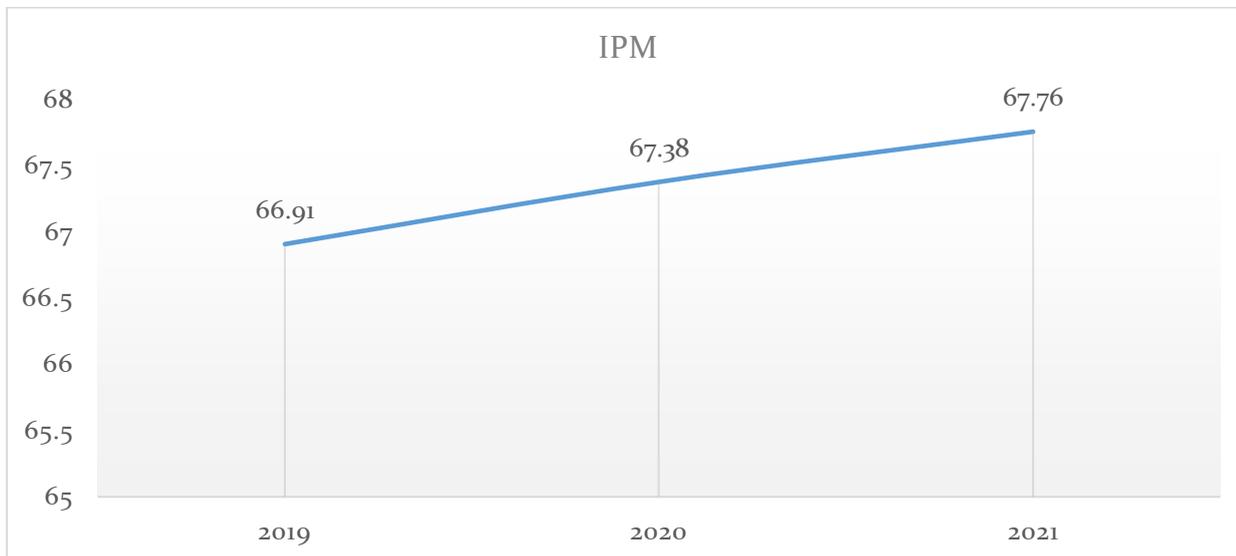
Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan atau tumbuh diatas 0,3 persen setiap tahun selama tahun 2019-2021. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekalipun menunjukkan peningkatan, namun dalam 3 tahun terakhir IPM Kepulauan Selayar masih berada pada kelompok IPM sedang (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), sedangkan kelompok IPM tinggi adalah indeks antara

70≤IPM<80. IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Dengan mempertahankan atau meningkatkan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun yang akan datang, maka IPM Kabupaten Kepulauan Selayar akan berpeluang untuk masuk ke dalam kelompok IPM tinggi dengan indeks $70 \leq \text{IPM} < 80$. Untuk mengetahui lebih dalam terkait perkembangan IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu melihat 4 (empat) indikator pembentuk IPM yaitu, Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

Dimensi	Tahun		
	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,34	68,46	68,52
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,48	12,65	12,66
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,63	7,88	8,08
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	9.028	8.970	9.060

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Pada bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat



kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan program kesehatan tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berkat upaya pemerintah dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 mengalami peningkatan dan saat ini berada dikisaran usia 68,52 tahun, yang artinya secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 68,52 tahun.

Sementara pada bidang pendidikan, upaya pemerintah juga terbilang cukup baik. berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat dilihat peningkatan yang terjadi selama tahun 2019-2021. Angka harapan lama sekolah berkisar 12,66 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun keatas yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,66 tahun atau setara dengan Diploma 1. Sedangkan rata-rata lama sekolah berkisar 8,08 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,08 tahun atau sudah menamatkan kelas 1-2 SMP.

Pada sisi daya beli masyarakat juga memperlihatkan adanya peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari 8,970 juta rupiah perkapita pertahun menjadi 9,060 juta rupiah perkapita per tahun. Besaran pengeluaran ini tentu menjadi cermin tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. Kesejahteraan Masyarakat

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki aktivitas ekonomi yang beraneka ragam dengan sumbangan perekonomian terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini karena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan sehingga sangat menunjang aktivitas perikanan masyarakat serta memiliki lahan yang cukup potensi untuk kegiatan pertanian terutama tanaman perkebunan tahunan. Aktivitas ekonomi ini, dapat tercermin pada angka Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memberikan informasi gambaran kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah (output) pada suatu waktu tertentu.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kontribusi sejumlah lapangan usaha yang mendukungnya. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Dominasi sektor ini setiap tahunnya terlihat dari kontribusinya yang terbilang cukup besar selalu diatas 40 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada lapangan usaha pertanian khususnya perkebunan, Kabupaten Kepulauan Selayar banyak memproduksi tanaman tahunan seperti cengkeh, pala, kelapa (yang sebagian besar kemudian diolah menjadi kopra), jambu mete dan lainnya. Sedangkan pada sektor perikanan, produksi ikan kerapu, lencam, tuna, kuwe, baronang dan banyak ikan lainnya menjadi primadona dan sering menjadi komoditi ekspor antar daerah.

Sementara, aktivitas ekonomi konstruksi di Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi kedua sebagai kontributor perekonomian daerah. Lapangan usaha konstruksi menyumbang rata-rata di atas 20 persen terhadap perekonomian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Giat pembangunan baik dari pemerintah daerah maupun dari swasta mendorong lapangan usaha ini tetap tumbuh positif selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Distribusi PDRB		
			2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	44,69	42,44	42,61
B	Pertambangan dan Penggalian	%	0,88	0,93	0,94
C	Industri Pengolahan	%	2,75	2,81	2,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,08	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,09	0,11	0,10
F	Konstruksi	%	21,27	21,93	21,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,69	7,81	7,80
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2,43	1,99	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,24	0,22	0,22

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Distribusi PDRB		
			2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	%	2,23	2,51	2,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	1,27	1,36	1,30
L	Real Estat	%	1,30	1,46	1,39
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	7,38	7,84	7,71
P	Jasa Pendidikan	%	5,29	5,81	5,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	1,85	2,18	2,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	0,53	0,51	0,51
Produk Domestik Regional Bruto		%	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

PDRB harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berada di atas 6 triliun selama tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, aktivitas ekonomi Kepulauan Selayar menghasilkan PDRB harga berlaku sebesar 6,83 triliun rupiah. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang PDRB terbesar yaitu 2,91 triliun rupiah (42,62 persen) diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 1,49 triliun rupiah (21,87 persen). Selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 532,85 miliar rupiah (7,80 persen) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 526,87 miliar rupiah (7,71 persen). Sementara, penyumbang PDRB terkecil adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu 1,08 miliar rupiah. Jasa perusahaan pada tahun 2021 cukup terdampak oleh pandemi khususnya yang bergerak di bidang usaha tour/travel wisata dan sejenisnya, sementara itu Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pariwisata yang diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

PDRB Atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tiga tahun terakhir masih berada di level 3 triliun rupiah. Tercatat di tahun 2019, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 3,69 triliun rupiah, menurun di tahun 2020 menjadi 3,62 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2021 menjadi 3,77 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan nilainya lebih rendah karena tidak ada pengaruh inflasi didalamnya.

Tabel 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Miliar Rupiah):			
- Atas Dasar Harga Berlaku	6.444,22	6.392,74	6.835,40
- Atas Dasar Harga Konstan	3.685,67	3.620,20	3.765,56
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,68	-1,78	4,02

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar. Perekonomian Kepulauan Selayar pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,78 persen. Namun demikian, dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi seperti pemberlakuan kebiasaan normal baru dan refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat dari -7,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,27 persen pada tahun 2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh dari -19,00 pada 2020 menjadi 9,98 pada tahun 2021 serta penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh dari -11,85 pada tahun 2020 menjadi 4,14 tahun 2021. Dengan berbagai upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 tumbuh sebesar 4,02 persen. Berikut ini disajikan tabel laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha:

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Pertumbuhan PDRB		
			2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7,64	-7,12	3,27
B	Pertambangan dan Penggalian	%	4,27	1,44	6,91
C	Industri Pengolahan	%	19,09	-0,20	5,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	4,18	7,45	4,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	9,39	13,46	0,12
F	Konstruksi	%	3,84	2,01	4,12

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Pertumbuhan PDRB		
			2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,94	-0,42	5,28
H	Transportasi dan Pergudangan	%	14,31	-19,00	9,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	17,90	-11,85	4,14
J	Informasi dan Komunikasi	%	13,48	11,33	1,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	6,12	4,23	0,66
L	Real Estat	%	3,84	10,32	1,25
M,N	Jasa Perusahaan	%	9,10	-10,56	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	6,29	3,65	4,15
P	Jasa Pendidikan	%	7,81	7,22	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	10,51	12,01	9,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	21,80	-4,95	5,77
Produk Domestik Regional Bruto		%	7,68	-1,78	4,02

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

3.2.2. PDRB Per Kapita

Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat yang direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Karena keterbatasan data pendapatan perkapita, umumnya PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan indikator tersebut. Berikut adalah perkembangan PDRB perkapita harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

Tabel 3. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2019	47,99	27,45
2020	46,73	26,46
2021	49,54	27,29

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

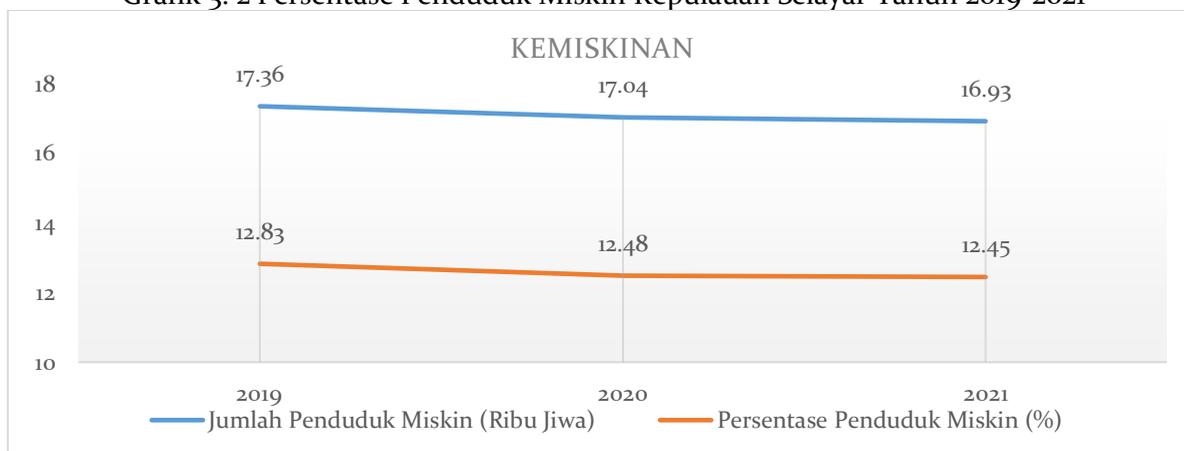
PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2020. Dari tabel di atas, PDRB Perkapita mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh dampak pandemi sehingga menyebabkan PDRB harga berlaku menurun dan pengaruhnya lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun yang sama. Dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 6.392,7 Milliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021 sehingga PDRB perkapita pada tahun 2021 juga kembali mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 46,73 juta rupiah, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 49,54 juta rupiah.

3.2.3. Kemiskinan

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan dan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2021, persentase penduduk miskin sebesar 12,45 persen (16,93 ribu jiwa) dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,83 persen (17,36 ribu jiwa). Rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 0,19 persen (215 jiwa). Secara detail dapat dilihat pada grafik berikut:

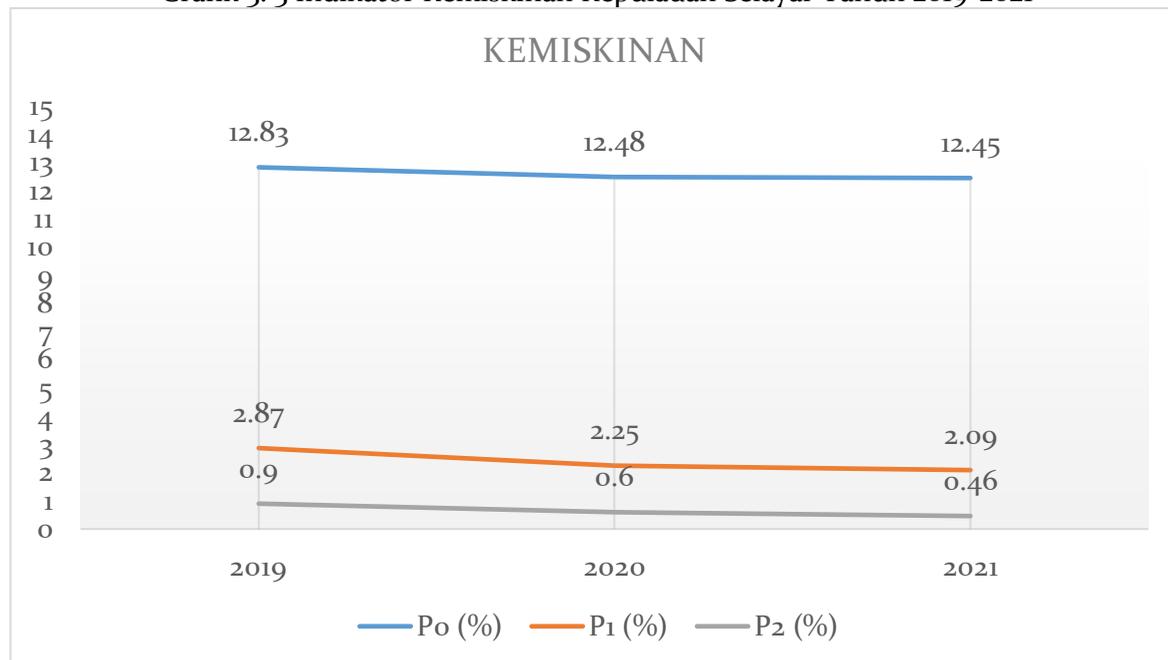
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2022

Penurunan angka kemiskinan sebagaimana disajikan pada grafik di atas, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang termuat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam beberapa tahun terakhir yang salah satunya adalah Penurunan Angka Kemiskinan dan/atau Penguatan Ekonomi Daerah. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Kepulauan Selayar untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya berupa pemberian bantuan sosial secara intensif bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdapat di 11 kecamatan.

Grafik 3. 3 Indikator Kemiskinan Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021



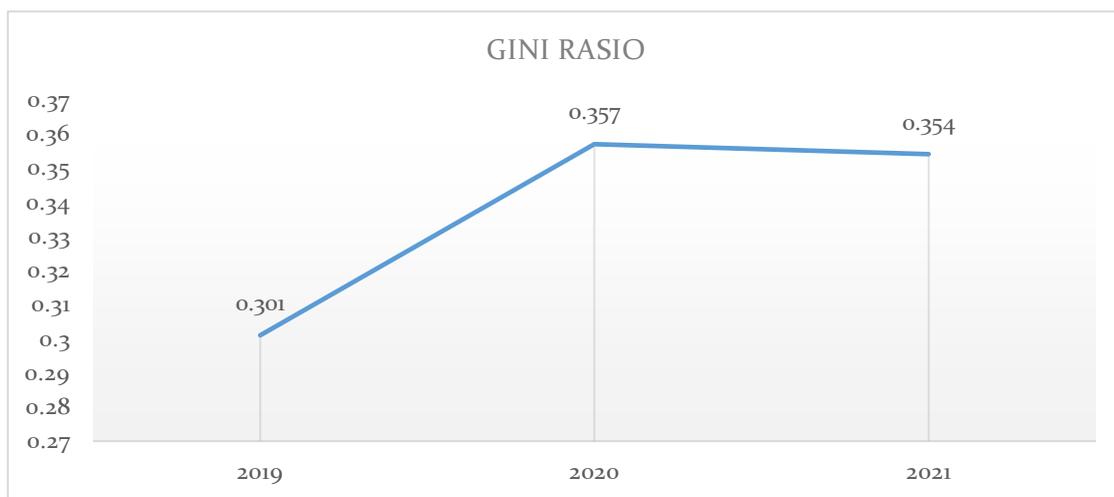
Sumber: BPS Kepulauan Selayar, Tahun 2022

Berdasarkan data pada grafik di atas, persentase penduduk miskin (Po) di Kepulauan Selayar pada tahun 2021 mencapai 12,45 persen dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 2,09 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,46. Indeks P1 yang mengecil di tahun 2021 dari 2,25 menjadi 2,09 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kepulauan Selayar semakin membaik karena semakin mendekati garis kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu sebesar Rp 396.822 perkapita perbulan. Sementara indikator lain seperti P2 juga menunjukkan hal serupa di tahun 2021 dimana indeksnya berkurang dari 0,60 menjadi 0,46. Semakin kecil nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar juga semakin mengecil.

3.2.4. Gini Rasio

Gini Rasio atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahu terakhir, pada tahun 2020 adalah sebesar 0,357, capaian tersebut meningkat negatif jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,301. Pada tahun 2021 gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,354. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 3,93 persen pada tahun 2020 menjadi 0,80 persen pada tahun 2021 sementara golongan pengeluaran \geq 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

Grafik 3. 4 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021



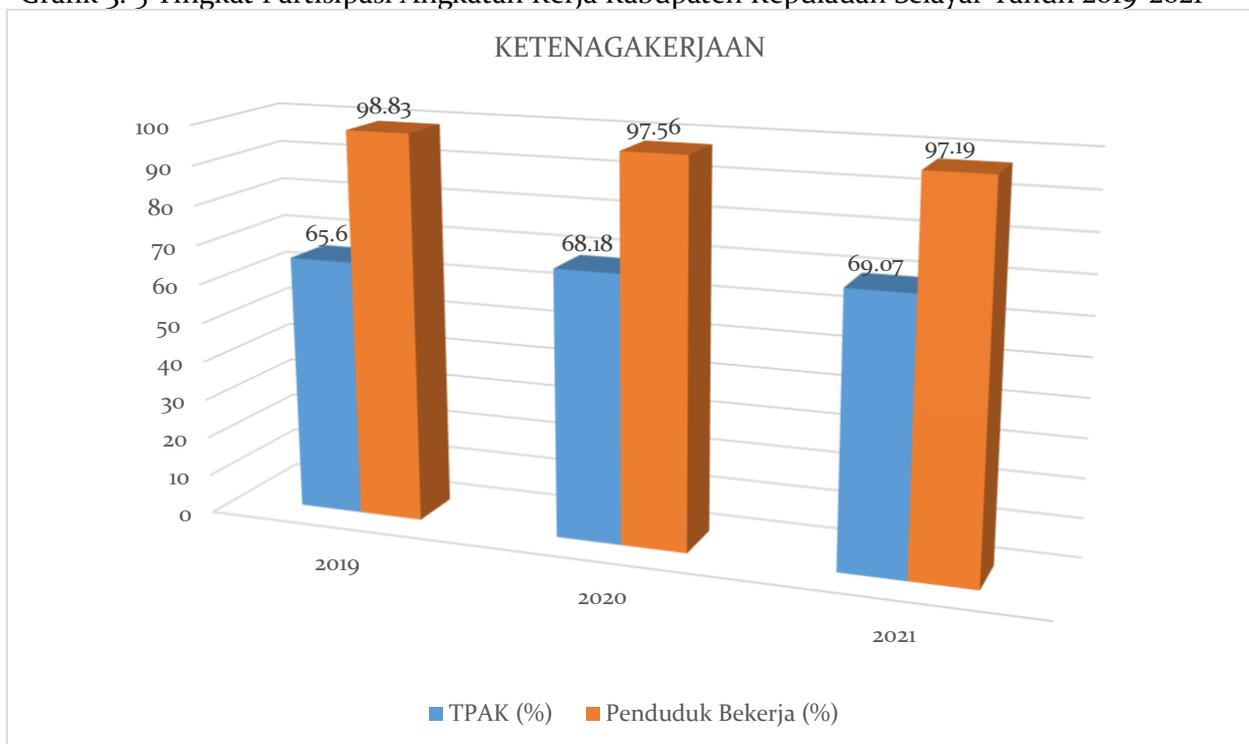
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

3.3. Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan merupakan data yang penting bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama yang menyangkut berbagai aspek penciptaan lapangan kerja baru. Terciptanya lapangan kerja baru diharapkan membuka kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran, memberikan pendapatan kepada masyarakat dan berujung pada peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah terkait ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian. Semakin besar TPAK akan semakin baik untuk daerah karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sedangkan TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Grafik 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

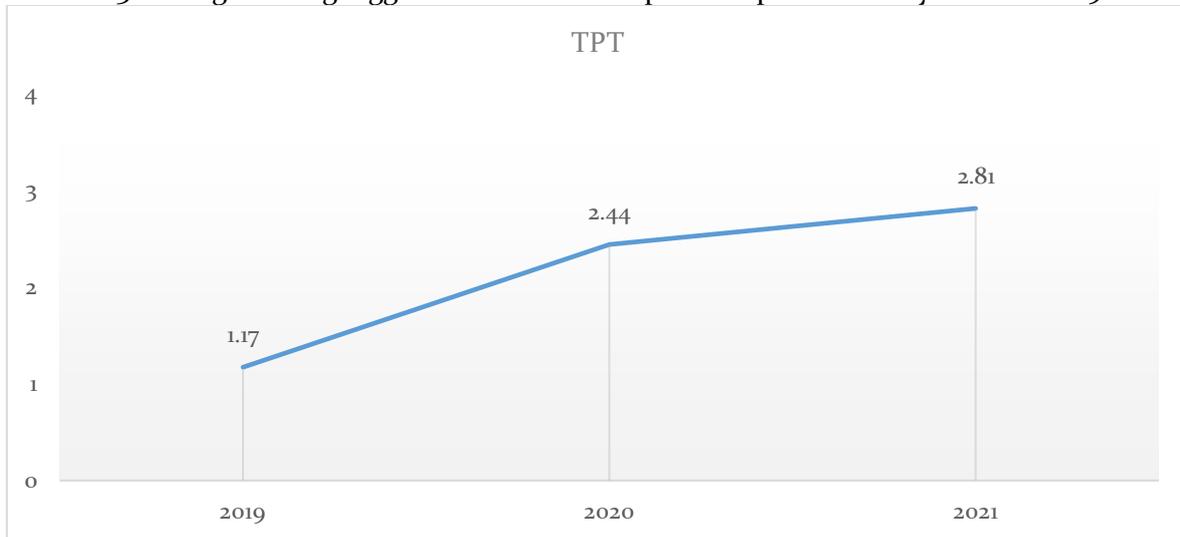


Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 adalah 65,60 persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 68,18 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 69,07 persen. Hal tersebut berarti pada tahun 2020, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas terdapat 69 orang yang termasuk kedalam angkatan kerja atau aktif secara ekonomi. Sedangkan Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 71.533 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut,

jumlah yang bekerja sebesar 69.522 jiwa atau 97,19 persen. Persentase tersebut lebih rendah dari tahun 2020 yaitu sebesar 97,56 persen.

Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

TPT Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 meningkat dari 2,44 persen menjadi 2,81 persen. Ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya persentase pengangguran terbuka disebabkan karena banyaknya angkatan kerja tahun 2021 yaitu 71.533 jiwa, dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 69.858 jiwa atau meningkat sebesar 2,40 persen. Sementara persentase penduduk bekerja hanya meningkat sebesar 2,00 persen dari tahun 2020 sebanyak 68.156 jiwa menjadi 69.522 jiwa pada tahun 2021. Sejatinya, pemerintah daerah telah berupaya untuk menyiapkan sejumlah pelatihan kerja dan kebijakan yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, namun terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan sejumlah usaha terpaksa mengurangi aktivitas ekonominya, memangkas biaya operasional dan bahkan ada juga yang tutup sementara waktu. Efek domino dari sejumlah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh para pengusaha ini tentu berdampak pada terciptanya pengangguran-pengangguran baru.

BAB IV POTENSI DAERAH

4.1. Potensi Daerah

4.1.1. Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian baik nasional maupun daerah. Sektor pertanian juga merupakan aspek penting sebagai pendukung bergeraknya roda perekonomian. Hal tersebut juga berlaku untuk Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Berdasarkan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, pertanian/perkebunan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 16,75 persen, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	15,84	16,03	16,75
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,88	2,94	2,83
Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,97	0,99	0,96
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	10,46	10,99	11,86
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,13	1,11	1,10

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, 2022

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain sebagai salah satu dari aspek pendukung perekonomian daerah, sektor pertanian juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, bahan informasi bagi penentuan kebijakan, bahan penelitian dan pendidikan serta bahan promosi adalah informasi luas panen, produksi dan produktivitas.

Berdasarkan uraian diatas, berikut disajikan perkembangan data Luas panen, Produksi, dan Produktivitas dari sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dilihat pada tabel berikut:

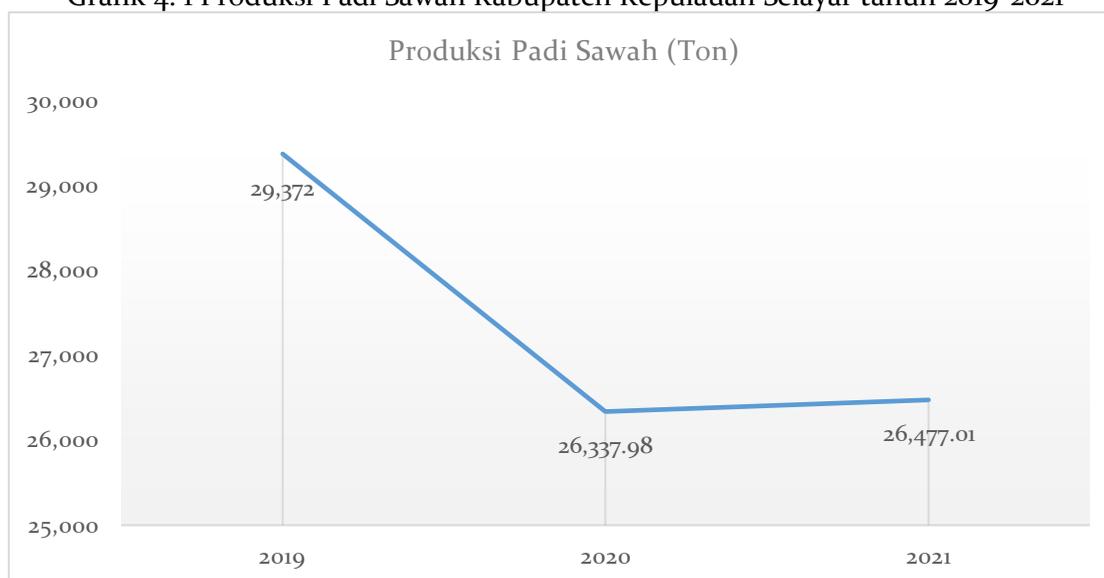
Tabel 4. 2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Uraian	Satuan	Tanaman Pangan		
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung
Luas Panen	Ha	3.212,6	4	1.926,85
Produksi	Ton	26.477,01	13,6	11.432,12
Produktivitas	Kw/Ha	82,47	34	59,33

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk gabah kering panen (GKP) sebanyak 26.490,61 ton. Dari total produksi tersebut, sebesar 13,6 ton merupakan produksi padi ladang.

Grafik 4. 1 Produksi Padi Sawah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi padi sawah, selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini kurang baik, karena belum sejalan dengan tujuan dari pemerintah kabupaten maupun nasional meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu kendala yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan produksi GKP adalah masih banyaknya petani yang mengandalkan air hujan/tadah hujan sebagai sumber pengairan untuk lahan sawahnya. Dari ±3.800 Ha lahan sawah di

Kabupaten Kepulauan Selayar, lebih dari 50 persen pengairan sawah masih mengandalkan pengairan tadah hujan dan sisanya menggunakan irigasi.

Selain tanaman pangan, potensi pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarma, dan tanaman hias yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, bahan informasi bagi penentuan kebijakan, bahan penelitian dan pendidikan serta bahan promosi dari data tanaman hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah informasi luas panen, produksi, dan produktivitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan perkembangan data luas panen, produksi dan produktivitas dari potensi tanaman hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021:

Tabel 4. 3 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

No.	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Bawang Merah	18	1.409	78,28
2.	Cabai Rawit	49	390	7,96
3.	Cabai Besar	12	87	7,25
4.	Kacang Panjang	37	371	10,03
5.	Labu Siam	40	1.466	36,65
6.	Terung	51	275	5,39
7.	Tomat	26	186	7,15
8.	Mentimun	32	310	9,69
9.	Kangkung	75	287	3,83

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, produktivitas dari tanaman sayuran yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 berada dikisaran 3 sampai 78 kuintal/hektar. Jika melihat dari potensi tanaman hortikultura yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar seperti misalnya labu siam, yang produksinya mencapai 1.466 kuintal dalam setahun dan merupakan produksi tanaman sayuran terbesar, maka Kabupaten

Kepulauan Selayar bisa memperhatikan sektor industri yang dapat memanfaatkan labu siam untuk diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Selain tanaman sayuran, potensi pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari buah-buahan. Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai buah-buahan adalah sektor produksi.

Tabel 4. 4 Produksi Buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

No.	Jenis Tanaman	Produksi Pertahun (Kwintal)		
		2019	2020	2021
1	Durian	115	191	246
2	Jeruk Siam	31.843	32.288	34.102
3	Mangga	11.635	8.662	8.628
4	Pepaya	1.580	1.797	1.520
5	Pisang	7.158	6.959	7.033
6	Nangka	829	1.804	1.878
7	Sukun	1.444	1.495	708
8	Melinjo	555	271	290
9	Jambu Biji	186	195	258

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi terbesar dari tanaman hortikultura buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah jeruk, mangga, dan pisang. Produksi jeruk dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan produksi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengembalikan kejayaan jeruk siam Selayar. Sebaliknya komoditas mangga memiliki tren produksi yang terus menurun dalam 3 tahun terakhir.

Selain sektor pertanian, potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar juga berasal dari sektor perkebunan. Beberapa komoditas perkebunan yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki prospek yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai data perkebunan adalah produksi komoditas tanaman perkebunan.

Tabel 4. 5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

No.	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Kelapa	309	26.436,42	855,55
2.	Kopi Robusta	9	3,35	3,72
3.	Kakao	553	192,08	3,47
4.	Vanili	113	23,61	2,09
5.	Jambu Mete	3.801	2.414,6	6,35
6.	Cengkeh	1.351	491,72	3,64
7.	Pala	2.463	406,79	1,65
8.	Kemiri	1.986	2.753,31	13,86
9.	Kenari	326	271,28	8,32

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat potensi perkebunan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar adalah komoditas kelapa. Tercatat produksi tahun 2021 mencapai 26 ribu ton lebih dengan produktivitas sebesar 855,55 kw/Ha. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencari sektor industri yang dapat dilibatkan untuk mengolah hasil tersebut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu industri yang dapat dikembangkan adalah pengolahan kelapa terpadu, karena saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar hanya aktif mengolah hasil kelapa menjadi komoditi kopra sementara bagian lain dari kelapa tersebut kurang termanfaatkan.

4.1.2. Perikanan

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki panjang garis pantai sekitar 670 km dengan jumlah pulau kecil sebanyak 130 pulau dan luas wilayah laut seluas 9.146,66 km² sehingga sangat potensial untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya laut dapat dikatakan cukup tinggi. Produksi perikanan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6 Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Produksi Perikanan Tangkap	ton	28.268,30	18.729,2	20.883,8
Produksi Perikanan Budidaya	ton	573,12	837,4	522,8

Sumber: Dinas Perikanan, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi sektor perikanan tangkap pada tahun 2021 menjadi sebesar 20.883,8 ton dan sebesar 4.636,2 ton dari produksi tersebut berasal dari Kecamatan Takabonerate. Selanjutnya secara berturut-turut produksi perikanan tangkap setiap kecamatan adalah, Kecamatan Bontosikuyu 3.142,5 ton, Bontoharu 3.085,6 ton, Pasimarannu 2.416,4 ton, Bontomatene 1.975 ton, Pasilambena 1.900,2 ton, Pasimasunggu 1.414,3 ton, Pasimasunggu Timur 901,9 ton, Bontomanai 777,2 ton, Buki 417,9 ton serta Benteng 215,7 ton.

Sementara untuk produksi perikanan budidaya sebesar 522,8 ton pada tahun 2021, berasal dari produksi budidaya laut sebesar 359,1 ton, tambak 102,8 ton, kolam 1 ton serta jaring apung sebesar 59,9 ton. Produksi tersebut didukung oleh rumah tangga perikanan budidaya dengan jumlah sebanyak 705 rumah tangga pada tahun 2021 yang tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun 3 kecamatan yang tidak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Pasilambena, Takabonerate dan Kecamatan Buki.

Untuk meningkatkan produksi perikanan, harus didukung dari beberapa program pembangunan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan melalui kegiatan-kegiatan yang bermuara pada pengembangan teknologi budidaya dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan, serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembangunan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

4.1.3. Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkembang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah potensi yang dimiliki seperti wilayah yang cukup luas, iklim yang mendukung serta kemudahan dalam memperoleh pakan untuk ternak sehingga sangat mendukung untuk pengembangan sektor peternakan ini. Namun demikian pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pada sektor peternakan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Selayar adalah populasi hewan ternak dan populasi unggas.

Tabel 4. 7 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	Populasi Hewan (Ekor)					Populasi Unggas (Ekor)			
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Pasimarannu	664	60	64	12.542	-	33.310	-	-	1.418
Pasilambena	205	-	411	2.452	-	21.687	-	-	448
Pasimasunggu	2.573	2.391	751	9.203	-	23.799	-	-	1.978
Takabonerate	21	-	41	2.753	-	19.544	-	-	138
Pasimasunggu Timur	56	1.927	497	5.036	-	40.218	-	-	2.173
Bontosikuyu	3.787	139	1.392	10.037	-	49.508	1.309	-	3.724
Bontoharu	6.779	213	123	1.687	-	41.948	3.632	1.063	816
Benteng	44	-	-	58	-	9.958	1.540	1.718	605
Bontomanai	3.497	255	425	7.928	32	68.054	1.878	724	1.145
Bontomatene	3.127	5	569	37.571	-	81.103	548	366	484
Buki	2.955	93	328	5.595	-	39.460	609	-	1.065
Kep. Selayar	23.688	5.083	4.601	94.862	32	428.589	9.516	3.871	13.994

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Kebutuhan akan hewan ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi pendorong meningkatnya aktifitas di sektor peternakan. Pada tahun 2021 populasi sapi potong mencapai 23.688 ekor dengan Kecamatan Bontoharu sebagai kecamatan dengan populasi sapi potong terbesar yaitu 6.779. Untuk populasi kerbau mencapai 5.083 ekor dengan Kecamatan Pasimassunggu sebagai kecamatan dengan populasi kerbau terbesar yaitu 2.391 ekor. Untuk populasi kuda mencapai 4.601 ekor dengan Kecamatan Bontosikuyu sebagai kecamatan dengan populasi kuda terbesar yaitu 1.392 ekor. Untuk



populasi kambing mencapai 94.862 ekor dengan Kecamatan Bontomatene sebagai kecamatan dengan populasi kambing terbesar yaitu 37.571 ekor dan untuk populasi domba hanya berasal dari Kecamatan Bontomanai sebesar 32 ekor.

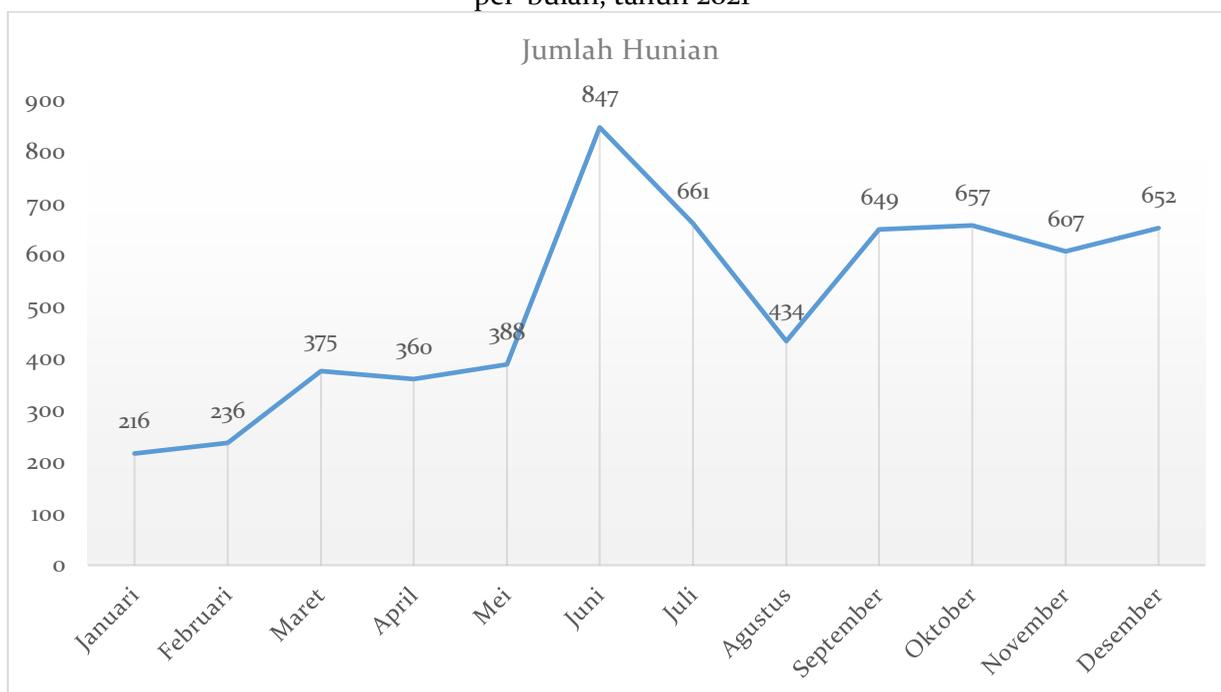
Pada sektor ternak unggas, pada tahun 2021 populasi ayam kampung sebesar 428.589 ekor dengan Kecamatan Bontomanai sebagai kecamatan dengan populasi ayam kampung terbesar yakni sebanyak 68.054. Untuk populasi ayam petelur mencapai 9.516 ekor dengan Kecamatan Bontomanai sebagai kecamatan dengan populasi ayam petelur terbesar yaitu 3.632 ekor. Untuk populasi ayam pedaging mencapai 3.871 ekor dengan Kecamatan Benteng sebagai kecamatan dengan populasi ayam pedaging terbesar yaitu 1.718 ekor dan untuk populasi itik/itik manila mencapai 13.994 ekor dengan Kecamatan Bontosikuyu sebagai kecamatan dengan populasi itik/itik manila terbesar yaitu 3.724 ekor.

4.1.4. Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbagai upaya yang dilakukan guna mengembangkan kepariwisataan di kabupaten diantaranya adalah melalui promosi wisata secara teratur baik di dalam maupun di luar daerah, penyediaan fasilitas akomodasi dan prasarana lainnya dan peningkatan mutu pelayanan. Untuk peningkatan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan agar arus wisatawan baik mancanegara maupun domestik semakin besar sehingga meningkatkan pula pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Penyediaan fasilitas akomodasi merupakan salah satu penunjang kegiatan kepariwisataan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 telah tersedia sekitar 29 fasilitas hotel dan akomodasi lainnya. Jumlah hotel bintang tiga sebanyak 1 hotel, hotel bintang satu sebanyak 4 hotel dan sisanya masuk dalam kategori akomodasi lainnya. Adapun jumlah tamu hotel dan akomodasi lainnya per bulan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4. 2 Banyaknya Tamu Hotel/ Akomodasi/ Penginapan Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

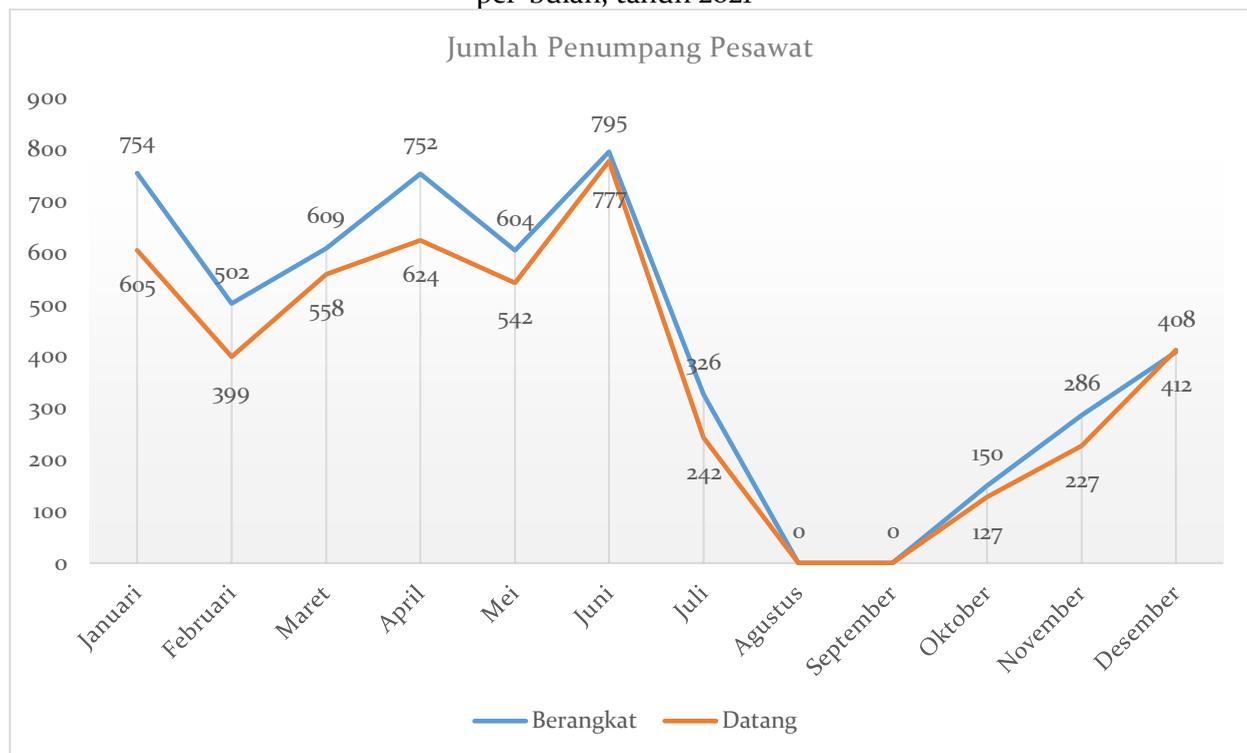
Berdasarkan data di atas, jumlah tamu hotel/ akomodasi/ penginapan tahun 2021 sebanyak 6.082 orang dengan jumlah tamu wisatawan domestik (WNI) sebanyak 6.060 orang dan wisatawan mancanegara (WNA) sebanyak 22 orang. Puncak tamu yang menginap pada seluruh hotel dan akomodasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 adalah pada pertengahan dan akhir tahun. Sedangkan jumlah tamu paling sedikit tercatat pada awal tahun yakni bulan Januari dan Februari. Tercatat puncak pengunjung hotel terjadi pada bulan Juni dengan angka 847 pengunjung. Sementara angka pengunjung terendah terdapat pada bulan Januari 2021 yakni hanya sebanyak 216 pengunjung. Hal ini dikarenakan resiko penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi pada awal tahun.

Salah satu indikator produktivitas dari hotel dan akomodasi lainnya adalah tingkat penghunian kamar hotel (TPK). Dengan mengetahui tingkat penghunian kamar hotel akan tergambar banyaknya tamu yang datang menginap serta lamanya tamu tersebut tinggal disuatu hotel dan akomodasi lainnya. TPK pada tahun 2021 sebesar 6,18 persen untuk hotel berbintang, sedangkan hotel nonbintang sebesar 6,71 persen. Ini berarti usaha sektor hotel dan akomodasi lainnya belum memberikan tanda-tanda

keuntungan/profit, dimana jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan menginap masih sedikit karena nilai TPK masih dibawah 20 persen.

Untuk melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat dilihat dari perkembangan sektor transportasi di kabupaten. Pada tahun 2021 tersedia dua maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari Kabupaten Kepulauan Selayar menuju kota Makassar atau sebaliknya. Maskapai penerbangan tersebut adalah Wings Air dan Citilink. Berikut adalah informasi perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat per bulan menggunakan jasa pesawat terbang di Bandar Udara Aroepala yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021:

Grafik 4. 3 Jumlah Penumpang Melalui Bandara Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Selain bandar udara, akses dari dan ke Kepulauan Selayar juga dapat melalui Pelabuhan Penyeberangan yang terletak di Selatan Pulau Selayar yaitu Pelabuhan Pamatata. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar juga bergantung pada aktivitas penyeberangan ini karena di pelabuhan tersebut terdapat kapal ferry yang melayani rute Pamatata (Selayar) – Bira (Bulukumba).

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh banyaknya destinasi wisata yang tersebar hampir di semua kecamatan. Salah satu obyek wisata yang mendunia dan menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Taman Nasional Takabonerate yang berada di Kecamatan Takabonerate. Berikut adalah informasi potensi lokasi ekowisata yang ada di taman nasional Takabonerate:

Tabel 4. 8 Lokasi Ekowisata di Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Aktivitas Yang Dapat Dilakukan
1	Pulau Tinabo Besar	272,77	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, canoing, camping, fishing
2	Pulau Belang-belang	214,53	Menyelam, snorkel, camping
3	Pulau Lantigiang	111,29	Menyelam, snorkel, berenang
4	Pulau Rajuni	1.023,29	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing, berkatamaran
5	Pulau Latondu	2.453,73	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
6	Pulau Tarupa	762,12	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
7	Taka Gantarang	1.877,37	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
8	Taka Belanda	1.507,02	Menyelam, snorkel, fishing
9	Bunging Belle	679,98	Menyelam, snorkel, fishing
10	Taka Taburi	5.931,51	Menyelam, snorkel, fishing
11	Taka Bongko	1.265,80	Menyelam, snorkel, fishing
12	Pulau Pasitallu	5.931,51	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
13	Taka Meriam	1.827,00	Menyelam, snorkel, fishing
14	Taka Subuh	1.011,00	Menyelam, snorkel, fishing
15	Taka Kayu Bulan	1.786,00	Menyelam, snorkel, fishing
16	Pulau Jinato	661,59	Menyelam, snorkel, berjemur, berenang, camping, fishing
17	Taka Rajuni	2.899,00	Menyelam, snorkel, fishing
18	Taka Tero	2.599,00	Menyelam, snorkel, fishing
19	Taka Bubbe	1.367,00	Menyelam, snorkel, fishing
20	Taka Sepe	1.621,00	Menyelam, snorkel, fishing
21	Taka Tumbor	6.178,00	Menyelam, snorkel, fishing
22	Taka Sirobe	1.617,00	Menyelam, snorkel, fishing

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Taman Nasional Takabonerate merupakan taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Luas atol di kawasan ini diperkirakan mencapai 220.000 hektar dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Karena topografi kawasan ini yang unik serta menarik dimana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau karang kosong dengan rataaan terumbu karang yang luas dan tenggelam dimana terdapat banyak kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang menjadikan kawasan ini banyak menarik minat para pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Serangkaian event menarik dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya seperti kegiatan Festival Pesona Takabonerate. Event ini selain merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak arus wisatawan agar berkunjung ke Taman Nasional Takabonerate. Jumlah pengunjung Taman Nasional Takabonerate pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Jumlah Pengunjung di Taman Nasinal Takabonerate tahun 2021

Bulan	Wisatawan Asing (Orang)	Wisatawan Domestik (Orang)	Jumlah
Januari	-	48	48
Februari	-	100	100
Maret	-	120	120
April	-	28	28
Mei	6	78	84
Juni	-	704	704
Juli	-	54	54
Agustus	9	744	753
September	-	194	194
Oktober	-	152	152
November	-	449	449
Desember	-	48	48
Total	15	2.719	2.734

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

4.1.5. Industri dan Perdagangan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar, sektor industri

perlu lebih dikembangkan secara terpadu dan seimbang, karena dengan berkembangnya sektor ini diharapkan pula dapat membantu memecahkan masalah pengangguran dengan menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat mempercepat proses pembangunan wilayah.

Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun hanya sebesar 2,81 persen. Kondisi tersebut konstan dari tahun 2020 dan hanya naik sebesar 0,6 persen dari tahun 2019, padahal bahan baku untuk industri cukup melimpah karena disediakan sebagai produk dari hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pelatihan maupun event kreativitas harus banyak diselenggarakan oleh pemerintah agar industri pengolahan dapat berkembang dan menghasilkan produk unggulan daerah yang bisa dipasarkan di luar daerah dan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Milliar Rp.	177,48	179,35	191,83
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	2,75	2,81	2,81

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih di dominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga dan sebagian besar bergerak pada sub kategori pengolahan makanan dan minuman. Salah satu jenis industri yang tidak bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, namun banyak dikerjakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pengolahan kelapa menjadi komoditi kopra. Hal tersebut disebabkan karena melimpahnya produksi kelapa setiap tahunnya, dan proses pengerjaannya tidak membutuhkan modal besar. Sebagaimana data yang disajikan sebelumnya bahwa produksi kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 26.436,42 ton dan merupakan produksi terbesar untuk jenis tanaman perkebunan.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 7,80 persen pada tahun 2021, atau kontributor terbesar ketiga setelah

Pertanian, dan Kontruksi dengan besar PDRB atas dasar harga berlaku yaitu 532,85 Milliar Rupiah. Daya beli masyarakat yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor perdagangan.

Tabel 4. 11 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Milliar Rp.	495,76	499,08	532,85
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	7,69	7,81	7,80

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh pedagang kecil dan pedagang menengah, sedangkan pedagang besar masih sangat minim. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjual kembali dalam jumlah yang besar. Pedagang menengah membeli barang dalam jumlah besar dan menjual kembali kepada pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Pedagang Kecil membeli barang dalam jumlah sedang dan menjual kembali kepada konsumen akhir.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan terhadap pembangunan ekonomi diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembangunan pusat distribusi logistik untuk memaksimalkan potensi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim. Selain itu diperlukan pula upaya-upaya konkrit melalui bantuan modal usaha untuk pedagang kecil dan sarana prasarana industri yang dapat mendorong pelaku industri kecil atau rumah tangga untuk meningkatkan proses produksinya.

4.2. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan perekonomian suatu wilayah maka kegiatan sosial ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan infrastruktur akan turut menyertai hal tersebut. Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek dapat menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan dalam jangka menengah atau panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor unggulan suatu daerah. Pengembangan infrastruktur yang terarah dan terencana akan mendorong peningkatan pelayanan terhadap

pengembangan daerah sehingga tercipta perekonomian wilayah yang produktif. Sebagai kabupaten yang memiliki visi mewujudkan masyarakat maritim yang sejahtera tentu Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki fokus untuk mensejahterakan masyarakatnya baik dari sisi pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi pada berbagai sektor. Keterpenuhan berbagai sarana dan prasarana pendukung tentu menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi.

4.2.1. Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku atau pembentukan pribadi yang terarah pada diri peserta didik dalam usaha mendewasakan peserta didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, menjadikan pendidikan harus mendapatkan perhatian besar. Keberadaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Berikut merupakan data jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar:

Tabel 4. 12 Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	PAUD		Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama		Sekolah Menengah Atas		
	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
Pasimarannu	10	-	10	-	3	-	1	-	-
Pasilambena	6	-	10	-	5	-	-	1	-
Pasimasunggu	10	-	10	-	5	-	-	1	-
Takabonerate	10	-	13	-	7	-	1	-	-
Pasimasunggu Timur	10	-	9	-	4	1	1	-	-
Bontosikuyu	20	6	20	2	7	1	1	1	-
Bontoharu	12	5	13	3	4	2	2	-	-
Benteng	12	3	10	2	4	2	2	3	1
Bontomanai	20	1	19	3	5	3	1	1	-
Bontomatene	16	4	17	-	6	-	1	1	-
Buki	15	2	10	4	3	2	1	-	-
Jumlah	141	21	141	14	53	11	11	8	1

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Kualitas pendidikan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh rasio guru terhadap murid yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar pada setiap jenjang Pendidikan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat

pengawasan dan perhatian guruterhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1:20.

Tabel 4. 13 Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	PAUD		Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama	
	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
Pasimarannu	33	280	97	1.189	54	506
Pasilambena	22	173	103	999	64	494
Pasimasunggu	34	271	112	1.068	57	517
Takabonerate	40	501	119	1.775	91	669
Pasimasunggu Timur	30	254	100	769	66	392
Bontosikuyu	88	557	254	1.572	111	695
Bontoharu	65	431	232	1.293	133	769
Benteng	105	897	270	2.884	165	1.545
Bontomanai	79	385	237	1.294	116	567
Bontomatene	78	382	244	1.147	118	587
Buki	54	260	185	649	89	258
Jumlah	628	4.391	1.953	14.639	1.064	6.999

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022 diolah

Berdasarkan data di atas, rasio guru terhadap murid baik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021 sudah memenuhi standar sesuai peraturan pemerintah yang ditetapkan, yaitu rata-rata rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan PAUD adalah 628:4.391 atau 1 orang guru mengajar 7 murid (1:7), jenjang SD adalah 1.953:14.639 atau 1 orang guru mengajar 8 murid (1:8) dan jenjang pendidikan SMP adalah 1.064:6.999 atau 1 orang guru melayani 7 murid (1:7). Pemenuhan standar rasio ini untuk menjaga kualitas pengajaran dan pengawasan guru terhadap murid menjadi lebih optimal.

4.2.2. Sarana Kesehatan

Kualitas Sumber Daya Manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta berperan penting terhadap penanggulangan kemiskinan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut maka keberadaan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu untuk diperhatikan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan		
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu
Pasimarannu	-	1	5
Pasilambena	-	1	1
Pasimasunggu	-	1	5
Takabonerate	-	2	6
Pasimasunggu Timur	1	1	5
Bontosikuyu	-	2	11
Bontoharu	1	1	7
Benteng	-	1	1
Bontomanai	-	2	8
Bontomatene	-	2	8
Buki	-	1	5
Jumlah	2	15	62

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Keberadaan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan pustu memang sangat dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kebutuhan terhadap tenaga medis yang akan bertugas pada fasilitas pelayanan Kesehatan untuk melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikut data jumlah tenaga medis yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021.

Tabel 4. 15 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Pasimarannu	-	3	8	1	1
Pasilambena	1	7	4	-	1
Pasimasunggu	1	6	14	1	1
Takabonerate	1	7	14	1	2
Pasimasunggu Timur	2	5	8	2	2
Bontosikuyu	2	18	20	1	1
Bontoharu	37	124	58	11	9
Benteng	2	12	13	2	2
Bontomanai	1	24	18	1	2
Bontomatene	3	25	23	3	1
Buki	1	20	11	1	-
Jumlah	51	251	191	24	22

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Meskipun merupakan wilayah kepulauan yang memerlukan upaya tambahan untuk mengakses setiap wilayah, namun jumlah tenaga medis dapat tersedia di seluruh kecamatan Kepulauan Selayar. Dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, pada beberapa kecamatan masih terdapat profesi tenaga medis yang belum tersedia seperti di Kecamatan Pasimarannu yang tidak memiliki Dokter, di Kecamatan Pasilambena belum tersedia tenaga farmasi dan di Kecamatan Buki belum tersedia tenaga ahli gizi.

4.2.3. Sarana Transportasi

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sarana dan prasarana dimaksud adalah jalan, terminal, Pelabuhan maupun bandar udara. Berikut disajikan jumlah pelabuhan laut/ bandara/ terminal bis di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021:

Tabel 4. 16 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Kecamatan	Fasilitas Perhubungan			
	Pelabuhan Laut	Bandar Udara	Terminal Bis	Jumlah
Pasimarannu	1	-	-	1
Pasilambena	1	-	-	1
Pasimasunggu	1	-	-	1
Takabonerate	2	-	-	2
Pasimasunggu Timur	-	-	-	0
Bontosikuyu	1	-	-	1
Bontoharu	-	1	-	1
Benteng	1	-	1	2
Bontomanai	-	-	-	0
Bontomatene	2	-	-	2
Buki	-	-	-	0
Total	9	1	1	11

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Selain sarana prasarana sebagaimana disajikan pada tabel di atas, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4. 17 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	Tahun		
		2019	2020	2021
Jenis Permukaan				
Aspal	Km	469,25	483,34	485,74
Kerikil	Km	157,80	189,16	167,57
Tanah	Km	220,65	195,10	206,25
Lainnya	Km	8,90	-	8,04
Kondisi Jalan				
Baik	Km	231,50	293,46	311,70
Sedang	Km	102,70	116,89	179,45
Rusak	Km	274,53	206,47	128,48
Rusak Berat	Km	247,87	250,78	247,97
Total		856,60	867,60	867,60

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022



Kebutuhan akan sarana jalan, tidak cukup hanya memperhatikan panjang jalan saja melainkan harus dilihat dari kualitas/kondisinya. Pada tahun 2021 total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 867,6 km, sepanjang 311,70 km (36 Persen) dengan kondisi jalan yang baik dan 179,45 km (21 persen) dalam kondisi sedang sementara sisanya dalam keadaan rusak sepanjang 128,48 km (15 persen) dan rusak berat sepanjang 247,97 km (28 persen).

BAB V PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Dengan demikian, ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2019-2021, mengalami penurunan yang sangat besar dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,02 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain dalam wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi kelima dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur dengan pertumbuhan ekonomi -1,39 persen, sedangkan Kota Makassar merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47 persen. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi		
			2019	2020	2021
1	Luwu Timur	%	1,17	1,46	-1,39
2	Maros	%	1,24	-10,87	1,36
3	Pangkep	%	6,41	-1,69	3,46
4	Luwu Utara	%	7,11	-0,59	3,90
5	Kepulauan Selayar	%	7,68	-1,78	4,02
6	Toraja Utara	%	7,56	0,17	4,05
7	Pare Pare	%	6,65	-0,08	4,41
8	Makassar	%	8,79	-1,27	4,47
	Sulawesi Selatan	%	6,92	-0,70	4,65
	Nasional	%	5,02	-2,07	3,69

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022



Dengan memperhatikan data di atas, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun jika dilihat pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,65 persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,69 persen pada tahun yang sama. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi secara global dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun demikian, dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi seperti pemberlakuan kebiasaan normal baru dan refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat dari -7,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,27 persen pada tahun 2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh dari -19,00 pada 2020 menjadi 9,98 pada tahun 2021 serta penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh dari -11,85 pada tahun 2020 menjadi 4,14 tahun 2021.

5.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita adalah total PDRB dibagi dengan total penduduk pada suatu daerah untuk tahun yang sama. Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Namun penggunaan indikator pendapatan perkapita tentu belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesejahteraan penduduk, karena tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan tertentu, namun secara luas membandingkan antara besar pendapatan total dengan total jumlah penduduk. Lebih lanjut indikasi pendapatan perkapita harus disandingkan dengan keadaan inflasi, gini ratio dan beberapa indikasi kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran termasuk perkembangan harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 dan dengan meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan

usaha dari 6.392,7 Milliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021, sehingga PDRB perkapita pada tahun 2021 juga kembali mengalami peningkatan. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 46,73 juta rupiah, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 49,54 juta rupiah.

Tabel 5. 2 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB		
			2019	2020	2021
1	Luwu Utara	Juta Rp	41,65	41,07	44,33
2	Palopo	Juta Rp	43,79	43,66	46,52
3	Sinjai	Juta Rp	45,05	43,74	47,05
4	Sidrap	Juta Rp	46,49	44,12	47,19
5	Maros	Juta Rp	64,6	47,73	47,88
6	Luwu	Juta Rp	43,04	43,91	48,55
7	Bone	Juta Rp	47,81	45,68	48,8
8	Kepulauan Selayar	Juta Rp	47,99	46,73	49,54
	Sulawesi Selatan	Juta Rp	56,98	56,51	59,66
	Nasional	Juta Rp	59,32	57,27	62,24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi dari tujuh kabupaten lainnya dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Utara dengan PDRB Perkapita sebesar 44,33 Juta Rupiah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 59,66 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar 62,24 Juta Rupiah.

5.3. Gini ratio

Gini ratio atau koefisien gini merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Jika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Jika mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), indeks ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang digambarkan dengan nilai Gini Ratio, memperlihatkan angka yang naik turun selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai koefisien gini Kabupaten

Kepulauan Selayar adalah sebesar 0,357, capaian tersebut meningkat negatif jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,301. Pada tahun 2021 gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,354. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 3,93 persen pada tahun 2020 menjadi 0,80 persen pada tahun 2021 sementara golongan pengeluaran \geq 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

Tabel 5. 3 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Gini Rasio		
		2019	2020	2021
1	Bantaeng	0,338	0,344	0,332
2	Luwu Utara	0,364	0,344	0,341
3	Jeneponto	0,331	0,349	0,353
4	Kepulauan Selayar	0,301	0,357	0,354
5	Gowa	0,354	0,345	0,358
6	Sidrap	0,284	0,349	0,358
7	Palopo	0,338	0,354	0,358
8	Barru	0,36	0,357	0,359
	Sulawesi Selatan	0,391	0,389	0,377
	Nasional	0,380	0,385	0,381

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke empat jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, kabupaten dengan gini ratio terendah di wilayah ini adalah Kabupaten Bantaeng yakni sebesar 0,332. Sedangkan kabupaten dengan gini ratio tertinggi adalah Kabupaten Barru dengan nilai koefisien gini sebesar 0,359. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, capain tersebut masih berada dibawah target yaitu sebesar 0,32. Jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih baik dimana pada tahun 2021 gini rasio Sulawesi selatan sebesar 0,377 dan Nasional sebesar 0,381.

5.4. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data, Persentase penduduk miskin Kepulauan Selayar selalu mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni sebesar 13,83 persen pada tahun 2019 dan turun pada tahun 2020 menjadi 12,48 persen kemudian turun lagi

menjadi 12,45 persen pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program hibah dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat. Dampak dari pemberian berbagai bantuan dimaksud tidak serta merta dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, namun diyakini dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini, dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar secara bertahap. Berikut disajikan data persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021:

Tabel 5. 4 Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Gini Rasio		
		2019	2020	2021
1	Toraja Utara	12,41	12,01	11,99
2	Tana Toraja	12,35	12,10	12,27
3	Kepulauan Selayar	12,83	12,48	12,45
4	Enrekang	12,33	12,17	12,47
5	Luwu	12,78	12,65	12,53
6	Luwu Utara	13,60	13,41	13,59
7	Jeneponto	14,88	14,58	14,28
8	Pangkep	14,06	13,96	14,28
	Sulawesi Selatan	8,56	8,72	8,78
	Nasional	9,22	10,19	9,71

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah ketiga jika dibandingkan dengan tujuh Kabupaten lain dalam wilayah setaranya, dimana yang terendah adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar 11,99 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Pangkep sebesar 14,28 persen. Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka kemiskinan Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,78 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 784,98 ribu jiwa (terjadi peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,72 persen atau 776,83 ribu jiwa) dan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen dengan total jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,50 juta jiwa pada tahun 2021

5.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 66,91, pada tahun 2020 menjadi 67,38 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 67,76. Dengan IPM 67,76, capaian pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Selayar masuk status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), bersama dengan 12 kabupaten lainnya. Terdapat 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian IPM-nya masuk status “tinggi” (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$) antara lain: Gowa, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Pare-pare, Palopo. Sedangkan Makassar satu-satunya daerah yang status IPM-nya masuk kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$).

Tabel 5. 5 Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2021

No	Kab./ Kota	Gini Rasio			Laju IPM (%)
		2019	2020	2021	2020-2021
1	Jeneponto	64	64,26	64,56	0,47
2	Bone	65,67	66,06	66,4	0,51
3	Takalar	66,94	67,31	67,72	0,61
4	Sinjai	67,05	67,6	67,75	0,22
5	Kepulauan Selayar	66,91	67,38	67,76	0,56
6	Bantaeng	68,3	68,73	68,99	0,38
7	Soppeng	68,26	68,67	68,99	0,47
8	Pangkajene dan Kepulauan	68,29	68,72	69,21	0,71
	Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	0,43
	Nasional	71,92	71,94	72,29	0,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 sampai dengan 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2021 capaian IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,24 dan capaian Nasional sebesar 72,29. Jika dibandingkan dengan 8 (delapan) Kabupaten/ Kota dalam wilayah setara di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke 5 (lima).



Untuk melihat kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah adalah dengan melihat angka pertumbuhan IPM. Jika dibandingkan 8 (delapan) Kabupaten/ Kota dalam wilayah setara selama periode 2020-2021, pertumbuhan IPM tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pangkep dengan pertumbuhan sebesar 0,71 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Takalar sebesar 0,61 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah adalah Kabupaten Sinjai sebesar 0,22 persen, kemudian Kabupaten Bantaeng sebesar 0,38 persen. Untuk Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan sebesar 0,56 persen, menduduki peringkat tertinggi ke-3 dari 8 kabupaten/kota dalam wilayah setara di Sulawesi Selatan.



BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

6.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 “***Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan***”. Visi ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Selayar yang secara geografis didominasi oleh wilayah laut. Disamping itu, Visi tersebut diatas memberikan gambaran tentang adanya keinginan yang kuat baik secara politik maupun secara historis dari pemerintah dan masyarakat Selayar untuk menjadikan laut sebagai titik tumpu perekonomian daerah ke depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 20 tahun, dirumuskan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya kemaritiman;

Dalam arti; pembangunan Selayar bertumpu pada potensi kemaritiman dan menjadi sumber utama PAD yang mendukung perekonomian daerah, regional maupun nasional.

b. Meningkatkan kualitas SDM

Dalam arti; masyarakat mampu membuka lapangan kerja baru dan mengisi lapangan kerja yang tersedia; sedang SDM aparat mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (best practice) sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan berciri maritim.

c. Mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah

Dalam arti; Selayar menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif yang diperhitungkan, baik skala propinsi maupun nasional serta mampu mengatasi permasalahan daerah melalui pembangunan di segala bidang.

d. Melestarikan fungsi lingkungan hidup

Dalam arti; mempertahankan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berimbang dengan upaya pelestariannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005 – 2025, visi pembangunan daerah untuk 1 (satu) periode sebagaimana yang termuat dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah:

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu: pokok visi Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan pokok visi Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yang ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Dalam arti, Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. Dalam arti, pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan menuju dimensi peningkatan status desa, dan dimensi peningkatan ekonomi dan



pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan menjadi tujuan, dengan sasaran utama Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan;

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Dalam arti, Tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik;
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman. Dalam arti, Pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki;
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Mengandung makna, Memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah; dan
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengandung makna, Pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

6.1.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan posisi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sehingga berpotensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, menjadikan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik Barang dan Jasa Kawasan Timur Indonesia, serta menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya aparatur pemerintah.



Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di segala sektor, agar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian daerah. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kegiatan perekonomian daerah ini adalah terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya ditetapkan dengan mengacu pada tema dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tema dan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, serta memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan satu tahun sebelum tahun perencanaan berkenaan. Adapun prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

a) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020

Tema RKPD Tahun 2020 adalah: ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”***. Berdasarkan tema dimaksud, maka pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
3. Pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah
4. Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan

b) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021

Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 ***“Penguatan Potensi Ekonomi Lokal, SDM dan Layanan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah”***. Berdasarkan tema dimaksud, maka Pemerintah



Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.
3. Pengurangan angka kemiskinan
4. Penguatan Ekonomi Daerah
5. Pembangunan dan pengembangan terhadap pelaksanaan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Pemantapan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan

c) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022

Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 *“Akselarasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Potensi Kemaritiman Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”*. Berdasarkan tema tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan visi, misi, tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut di atas, dibutuhkan Langkah-langkah dan instrument yang tepat dimana dalam perencanaan pembangunan dikenal dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana target kinerja sasaran akan dicapai secara optimal dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan

dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

6.1.3. Inovasi Daerah

Secara umum berlakunya otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adanya kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya, maka Pemerintah Daerah menganggap paling mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Agar daerah itu bisa maju maka harus berani membuat inovasi yang baru sesuatu yang belum pernah dirasakan masyarakat sebelumnya. Saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saja, tetapi juga harus mampu menemukan terobosan terobosan baru dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu faktor penunjang pencapaian kinerja kepala daerah yaitu melalui inovasi daerah. Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan Pemerintah Pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga dibutuhkan perubahan atau pembaruan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menghasilkan beberapa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2021

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi	Ket.
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Poster Tanadoang	Pelayanan Kesehatan Hewan
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengolahan Kelapa Terpadu	Mengoptimalkan Pengolahan Kelapa

3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jari Menari	Sistem Pendaftaran Ekonomi Kreatif
4	Dinas Perikanan	Pengolahan Limbah Rumput Laut menjadi Pupuk	Pemanfaatan limbah rumput laut

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

6.2. Keuangan Daerah

6.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komponen pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat yang di dalamnya memuat dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, selanjutnya adalah Transfer Antar Daerah yang memuat pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Pertumbuhan pendapatan daerah secara detail disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022

Uraian (Sesuai PP 58 Tahun 2005)	Tahun 2020 (Rp)	Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	984.914.367.333	PENDAPATAN DAERAH	1.051.646.438.632	1.058.058.997.000
Pendapatan Asli Daerah	66.359.401.904	Pendapatan Asli Daerah	69.153.493.000	64.209.145.000
Pajak Daerah	7.963.533.659	Pajak Daerah	10.560.782.000	10.649.840.000
Retribusi Daerah	1.735.588.105	Retribusi Daerah	2.568.372.000	3.000.028.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.219.514.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.916.250.000	11.079.994.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.440.766.140	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.108.089.000	39.479.283.000
Dana Perimbangan	760.088.689.963	Pendapatan Transfer	931.270.059.623	963.277.686.000
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.606.065.342	Transfer Pemerintah Pusat	874.776.987.623	925.337.686.000
Dana Alokasi Umum	565.134.101.000	Dana Perimbangan		851.342.260.000
Dana Alokasi Khusus	179.348.523.621	Dana Transfer Umum		575.375.985.000
Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	158.466.275.466	- DBH		14.780.656.000
Hibah	674.000.000	- DAU		560.595.329.000
Dana Darurat	-	Dana Transfer Khusus		275.966.275.000
Bagi Hasil dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	30.697.311.466	- DAK Fisik		163.036.695.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.297.259.000	- DAK Non Fisik		112.929.580.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.264.748.000	Dana Insentif Daerah		2.950.221.000
Dana Desa	84.532.957.000	Dana Otonomi Khusus		
		Dana Keistimewaan		
		Dana Desa		71.045.205.000
		Transfer Antar Daerah	56.493.072.000	37.940.000.000
		Pendapatan Bagi Hasil		35.000.000.000
		Bantuan Keuangan		2.940.000.000
		Lain-lain Pendapatan yang Sah	51.222.886.000	30.572.166.000
		Hibah	7.635.400.000	
		Dana Darurat		
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	43.587.486.000	30.572.166.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022



Meskipun kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga tahun 2022, diharapkan pada tahun selanjutnya PAD dapat mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan semakin memperkuat struktur anggaran pendapatan daerah.

6.2.2. Belanja Daerah

Secara umum Komponen belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari (1) Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Aset Lainnya; (3) Belanja Tidak Terduga; (4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dan dalam tiga tahun terakhir upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
2. Melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pencapaian Visi Misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Program Pembangunan Nasional;
4. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;

5. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 6. 3 Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022

Uraian (Sesuai PP 58 Tahun 2005)	Tahun 2020 (Rp)	Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
BELANJA DAERAH	1.010.035.371.654	BELANJA DAERAH	1.117.135.394.615	1.136.008.538.012
Belanja Tidak Langsung	565.199.066.706	Belanja Operasi	745.675.737.803	702.737.723.026
Belanja Pegawai	348.018.683.522	Belanja Pegawai	395.470.896.014	367.515.309.514
Belanja Bunga	-	Belanja Barang dan Jasa	295.461.313.557	292.125.918.225
Belanja Subsidi		Belanja Bunga		
Belanja Hibah	38.637.800.000	Belanja Subsidi		
Belanja Bantuan Sosial	9.144.800.000	Belanja Hibah	38.999.790.232	31.421.155.687
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.273.327.000	Belanja Bantuan Sosial	15.743.738.000	11.675.339.600
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	143.423.655.529	Belanja Modal	213.523.759.812	294.434.250.986
Belanja Tidak Terduga	24.700.800.655	Belanja Tanah	2.531.500.000	
Belanja Langsung	444.836.304.948	Belanja Peralatan dan Mesin	62.959.129.758	
Belanja Pegawai	57.700.192.630	Belanja Bangunan dan Gedung	49.579.166.046	
Belanja Barang dan Jasa	214.205.939.961	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.333.964.008	
Belanja Modal	172.930.172.357	Belanja Aset Tetap Lainnya	120.000.000	
		Belanja Aset Lainnya		
		Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000	3.000.000.000
		Belanja Transfer	155.135.897.000	135.836.564.000
		Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000	1.500.000.000
		Belanja Bantuan Keuangan	153.635.897.000	134.336.564.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2020–2022 nilainya terus meningkat. Pada Tahun Anggaran 2020 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1,010 Triliun lebih dan menjadi sebesar Rp. 1,117 Triliun lebih pada Tahun Anggaran 2021 serta pada tahun 2022 sebesar Rp. 1,236 Triliun lebih.

6.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan bagian yang sama pentingnya dengan bagian pendapatan dan belanja. Apabila terjadi surplus anggaran maka alokasi penggunaannya dilaksanakan melalui pos-pos yang ada dalam pembiayaan. Demikian pula apabila terjadi defisit yang tidak bisa lagi ditutup dengan menaikkan pos-pos yang ada dalam struktur pendapatan, maka diupayakan ditutup melalui pos yang terdapat dalam bagian pembiayaan. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen Pembiayaan daerah terdiri atas (1) Penerimaan Pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6. 4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2022

Uraian (Sesuai PP 58 Tahun 2005)	Tahun 2020 (Rp)	Uraian (Sesuai PP 12 Tahun 2019)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan	94.098.199.312	Penerimaan Pembiayaan	67.488.955.992	77.949.541.012
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	94.041.496.437	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	67.488.955.992	77.949.541.012
Pencairan Dana Cadangan	-	Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		

Penerimaan Pinjaman Daerah	-	Penerimaan Pinjaman Daerah		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	56.702.875	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Penerimaan Piutang Daerah	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
Pengeluaran Pembiayaan	1.500.239.000	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.500.239.000	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	
Pembayaran Pokok Utang	-	Pembentukan Dana Cadangan		
Pemberian Pinjaman Daerah	-	Pemberian Pinjaman Daerah		
		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
Pembiayaan Neto	92.597.960.312	Pembiayaan Neto	65.488.955.992	77.949.541.012

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2022

Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan pada periode 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 94,098 Milyar lebih dan Rp. 67,488 Milyar lebih. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 77,949 Milyar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,500 Milyar lebih dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,000 Milyar.



BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini diharapkan menghasilkan data statistik yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik serta dapat meningkatkan investasi sehingga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Tersusunnya profil pembangunan tahun 2021, diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim. Beberapa sektor yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dengan potensi peningkatan produksi beras, kelapa, cengkeh dan lain-lain, pengembangan sektor perikanan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan keberadaan Taman Nasional Takabonerate, serta pengembangan industri dan perdagangan untuk pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

7.2. Rekomendasi

Profil pembangunan daerah dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan oleh para pemangku kepentingan, khususnya dalam menyusun program/ kegiatan berdasarkan dengan isu strategis, permasalahan dan capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyusunan profil pembangunan daerah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama, sehingga profil pembangunan yang disusun pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.